

## ABSTRAK

### PENGAWASAN ONE TIER BOARD SYSTEM DI INDONESIA (Studi Perbandingan di Negara Malaysia dan Singapura)

Muhamad Sidik 2210622064, Suherman, Atik Winanti

Penelitian ini menganalisis secara komparatif implementasi konsep Perseroan Terbatas Perseorangan yang mengadopsi sistem one-tier board di Indonesia pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dibandingkan dengan praktik di Malaysia (Sendirian Berhad/Sdn Bhd) dan Singapura (Private Limited/Pte Ltd). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian normatif ini dapat dikatakan juga dengan penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga yurisdiksi mengadopsi sistem satu pemegang saham, terdapat perbedaan substansial dalam kerangka pengawasan. Malaysia dan Singapura memiliki Companies Act yang sangat detail dalam mengatur kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) direktur dan larangan konflik kepentingan, serta mewajibkan adanya sekretaris perusahaan sebagai garda terdepan kepatuhan dan pembagian tanggung jawab. Selain itu, sistem sanksi di kedua negara lebih tegas dan berlapis. Di sisi lain, PT Perseorangan di Indonesia masih menghadapi tantangan pengawasan internal karena dasar hukum yang belum menyeluruh dalam mengatur aspek ini, absennya kewajiban sekretaris perusahaan, dan sistem sanksi yang cenderung fokus pada pencoretan status badan hukum tanpa jenjang yang preventif. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan kerangka hukum PT Perseorangan di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang lebih detail mengenai *fiduciary duties* dan konflik kepentingan direktur tunggal.

**Kata Kunci:** PT Perseorangan, One-Tier Board System, Hukum Perusahaan Malaysia dan Singapura.

## **ABSTRACT**

### ***SUPERVISION OF ONE-TIER BOARD SYSTEM IN INDONESIA (Comparative Study in Malaysia and Singapore)***

Muhamad Sidik 2210622064, Suherman, Atik Winanti

*This study comparatively analyzes the application of the concept of a Sole Proprietorship Limited Liability Company that adopts a one-level management system in Indonesia after Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law, compared to the practice in Malaysia (Sendirang Berhad/Sdn Bhd) and Singapore (Private Limited/Pte Ltd). This study uses a normative legal method, this normative research can also be said to be doctrinal research or library research. This normative research is aimed at written regulations sourced from secondary data. The results of the study show that although all three jurisdictions adopt a one-shareholder system, there are substantial differences in the supervisory framework. Malaysia and Singapore have very detailed Company Laws in regulating the fiduciary duties of directors and the prohibition of conflicts of interest, and require a company secretary as the vanguard of compliance and division of responsibilities. In addition, the sanction system in both countries is stricter and more layered. On the other hand, PT Persero in Indonesia still faces internal supervision challenges due to the incomplete legal basis in regulating this aspect, the absence of corporate secretary obligations, and a sanction system that tends to focus on revoking legal entity status without any preventive measures. Therefore, this study recommends improving the legal framework of PT Persero in Indonesia by adopting more detailed regulations regarding fiduciary duties and conflicts of interest of sole directors.*

**Keyword:** *Single Member Company, Single Tier Board of Directors System, Company Law Malaysia and Singapore.*